

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN BELANJA
MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DAN TINGKAT KEMISKINAN
(Studi Kasus Pada Kota Tegal)**

Andri Widiyanto ¹, Erni Unggul Sedya Utami ², Asrofi Langgeng Nurmansyah ³

Email: andriwidi29@gmail.com

^{1,2,3}Dosen D3 Akuntansi Politeknik Harapan Bersama
Jl. Mataram No. 9 Tegal

Abstrak

Isu yang familiar dalam pengelolaan administrasi publik pada era sekarang adalah tentang *Good Governance*, merupakan momentum pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan, ditengah tuntutan yang gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah agar terselenggaranya pemerintahan yang bersih yang menjunjung tinggi asas keterbukaan. Pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah diperkuat dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004. Otonomi daerah merupakan pergeseran sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Dengan sistem desentralisasi yang mengedepankan prinsip otonomi daerah ini, maka menuntut semua pihak untuk melakukan perubahan dan pemahaman tentang tugas dan kewenangan pemerintahan daerah.

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah menguji dan menganalisis Pengaruh Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tegal, menguji dan menganalisis Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kemiskinan di Kota Tegal. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kota Tegal dan data yang digunakan adalah data sekunder. Model dan Teknik Analisis Data pengujian hipotesis menggunakan PLS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi serta dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kemiskinan dan belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Kata Kunci: DAU, DAK, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskina

1. Pendahuluan

Isu yang familiar dalam pengelolaan administrasi publik pada era sekarang adalah tentang *Good Governance*. Ini merupakan momentum pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan, ditengah tuntutan yang gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah agar terselenggaranya pemerintahan yang bersih yang menjunjung tinggi asas keterbukaan. Pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah diperkuat dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Otonomi daerah merupakan pergeseran sistem pemerintahan dari sistem

sentralisasi ke sistem desentralisasi. Dengan sistem desentralisasi yang mengedepankan prinsip otonomi daerah ini, maka menuntut semua pihak untuk melakukan perubahan dan pemahaman tentang tugas dan kewenangan pemerintahan daerah. Menurut Thesaurianto (2007), salah satu alasan penyelenggaraan otonomi daerah adalah agar pembangunan di daerah berjalan seiring dengan pembangunan di pusat. Jadi, munculnya otonomi daerah terkandung maksud untuk memperbaiki kekeliruan yang terjadi selama ini dengan cara memberikan peluang kepada daerah untuk mengelola keuangan dengan lebih mandiri ^[1]. Pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat dilihat hanya dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, akan tetapi diimbangi dengan sejauh mana

instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab ^[2].

Potensi keuangan daerah yang tidak sama menimbulkan adanya kesenjangan keuangan yang dapat mengakibatkan kesenjangan pembangunan antar daerah. Untuk mengurangi kesenjangan dan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan, lahirilah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Dana Perimbangan menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan komponen penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan dalam daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada umumnya ditunjukkan oleh laju dari PDRB. Laju pertumbuhan beberapa sektor di setiap kabupaten/kota sangat beragam tergantung dari karakteristik sektor yang ada di kabupaten atau kota tersebut. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tersebut diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat krusial dan sulit untuk dipecahkan. Oleh karenanya, program pembangunan perlu direncanakan dengan matang tidak hanya bertumpu pada belanja modal saja akan tetapi berusaha juga membuat suatu program atau terobosan

untuk mengurangi penduduk miskin. Pembangunan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan pemerintah perlu ditingkatkan terutama untuk penduduk miskin, karena salah satu indikator kesejahteraan masyarakat dalam suatu Negara dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang tercermin dari anggaran pemerintah yang berpihak pada penduduk miskin (*pro-poor budgetting*).

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Tegal).

2. Metode Penelitian

a. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kota Tegal .

b. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari buku-buku teks dan berbagai laporan/ buku/ *compact disk* yang dipublikasikan oleh instansi terkait, seperti Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik Kota Tegal. Sumber data penelitian ini diperoleh dari dokumen laporan realisasi APBD melalui situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah. (www.djpk.depkeu.go.id).

Laporan realisasi APBD Kota Tegal dapat diperoleh data mengenai jumlah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, Sedangkan data mengenai Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Tegal.

c. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen, catatan-catatan, baik berupa catatan

transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

d. Model dan Teknik Analisis Data

1) Model Analisis

Model analisis Partial Least Square (PLS) yang digunakan dalam studi ini mengikuti pola model persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas, sedang model struktural digunakan untuk uji kausalitas (Pengujian hipotesis dengan model prediksi).

2) Teknik Analisis Data

Teknis analisis dalam pengujian hipotesis dalam studi ini menggunakan PLS. Hipotesis diterima jika nilai t-hitung > t-tabel. Jika koefisien jalur yang menghubungkan dua variabel laten memiliki t-hitung > t-tabel, disimpulkan bahwa hubungan kausalitas antarvariabel tersebut berpengaruh signifikan. sebaliknya, jika t-hitung < t-tabel, disimpulkan bahwa hubungan kausalitas antarvariabel tersebut berpengaruh tidak signifikan.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Analisis Induktif dengan Partial Least Square

Analisis induktif dengan Partial Least Square (PLS) pada penelitian ini meliputi Penilaian *Outer Model*, Perhitungan Nilai *Goodness Of Fit (Inner Model)* serta Pengujian Hipotesis

b. Penilaian *Outer Model*

Dalam penelitian ini tidak melakukan penilaian *outer model* yang meliputi Uji Validitas dan Uji Reliabilitas karena data dalam penelitian ini terukur.

c. Perhitungan Nilai *Goodness Of Fit (Inner Model)*

Model structural dievaluasi dengan menggunakan R-square (R2) untuk konstruk dependen, Stone-Geisser Q-square test untuk predictive relevance dan uji T serta signifikan dari

koefisien parameter jalur structural. R2 dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh substantive. Seperti tersaji dalam tabel 1 berikut :

Tabel 1. Hasil *Inner Model (R-Square)*

Variabel	R Square
Belanja Modal	-
Kemiskinan	0,394875
Dana Alokasi Khusus	-
Dana Alokasi Umum	-
Pertumbuhan Ekonomi	0,206302
Sumber: Output PLS (Data Diolah)	

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa nilai R-Square untuk variabel Kemiskinan menunjukkan hasil 0,394875. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal, Dana Alokasi umum, dana alokasi khusus dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

d. Pengujian Hipotesis

1) Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil uji koefisien parameter antara dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai t statistic sebesar 0,914. Nilai t-statistik tersebut lebih kecil dibanding nilai t-tabel (t-statistik < 1,98) maka hipotesis ditolak. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama, dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan dana alokasi umum masih belum signifikan oleh karenanya sebaiknya pemerintah memprioritaskan alokasi dana alokasi umum dan belanja modal pada bidang-bidang yang langsung bersentuhan dengan kepentingan publik, seperti infrastruktur atau fasilitas-fasilitas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi

Hasil penelitian ini mendukung Setiyawati (2007)^[2] yang menjelaskan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, Akan tetapi penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Endrawati (2010) yang menunjukan hasil yang berbeda bahwasannya dana alokasi

umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi^[7].

2) Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil uji koefisien parameter antara dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai t statistic sebesar Hasil uji koefisien parameter antara dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai t statistic sebesar 1,607. Nilai t-statistik tersebut lebih kecil dibanding nilai t-tabel ($t\text{-statistik} < 1.98$) maka hipotesis ditolak. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua, dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hal ini disebabkan karena dana alokasi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kurang dioptimalkan untuk berbagi aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya sehingga tidak mampu meningkatkan produktivitas perekonomian dan pada akhirnya tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

3) Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil uji koefisien parameter antara belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai t statistic sebesar 0,275. Nilai t-statistik tersebut lebih kecil dibanding nilai t-tabel ($t\text{-statistik} < 1.98$) maka hipotesis ditolak. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga, belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini bermakna bahwa alokasi belanja modal tidak didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana untuk masyarakat akan tetapi digunakan untuk keperluan belanja rutin yang kurang produktif seperti belanja pegawai, perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan^[9] sehingga tidak mampu meningkatkan produktivitas perekonomian dan pada akhirnya tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

Teori Harrod-Domar yang memandang bahwa ada hubungan ekonomis antara besarnya stock modal (K) dan tingkat output (Y). Semakin banyak tabungan dan kemudian diinvestasikan, maka semakin cepat pula perekonomian tersebut akan tumbuh. Hal ini sesuai Smith yang menjelaskan bahwa timbulnya peningkatan kinerja pada satu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi, dan memperluas pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi semakin pesat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Teori dan pendapat tersebut belum bisa sepenuhnya dikatakan benar, karena secara statistik dalam penelitian ini, teori dan pendapat tersebut tidak terbukti, penelitian ini menjelaskan bahwa semakin tinggi belanja modal maka pertumbuhan ekonomi belum tentu akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian^[10] yang menjelaskan bahwa belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Bastias (2010) yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah atas transportasi signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia^[11].

4) Dana Alokasi Khusus Terhadap Kemiskinan

Hasil uji koefisien parameter antara dana alokasi khusus terhadap kemiskinan menunjukkan nilai t statistic sebesar 1,998. Nilai t-statistik tersebut lebih besar dibanding nilai t-tabel ($t\text{-statistik} > 1.98$) maka hipotesis diterima. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat, dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

Hal ini disebabkan karena Dana Alokasi Khusus yang diterima pemerintah Kota Tegal digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus yang dimaksud adalah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh APBN misalnya untuk layanan berkaitan dengan penurunan tingkat kemiskinan di Kota Tegal. Berdasarkan

hal tersebut pemerintah kota Tegal berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam pengentasan kemiskinan. Ada beberapa program yang diwujudkan seperti Raskin, Bantuan Siswa Miskin, Program Keluarga Harapan, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, Akan tetapi, meskipun telah banyak program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan, ternyata jumlah penduduk miskin tidak mengalami penurunan secara signifikan. Menurut kajian yang dilakukan Balitbang Provinsi Jawa Tengah, kendala utama yang dihadapi dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan dapat diklasifikasikan dalam skala kebijakan, konsep, implementasi dan partisipasi.

5) Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan

Hasil uji koefisien parameter antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan menunjukkan nilai t statistic sebesar 3,63. Nilai t-statistik tersebut lebih besar dibanding nilai t-tabel (t-statistik > 1.98) maka hipotesis diterima. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis kelima, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

Pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan adalah didasari pada kondisi *trickle down effect* yang menyebutkan adanya bagian yang menetes kebawah dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Kondisi ini menjelaskan bahwa kesejahteraan dengan sendirinya akan terwujud apabila terjadi pembangunan dalam skala besar sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas perekonomian, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan per kapita (berarti mengurangi kemiskinan), menaikkan permintaan dan penawaran, dan seterusnya berputar mengikuti mekanisme perekonomian.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh ^[12] yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dalam mengurangi kemiskinan, namun magnitude pengaruh relatif tidak besar dan ^[13] yang menjelaskan bahwa

pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak mendukung Nurdin (2009) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh langsung terhadap kemiskinan daerah perkotaan ^[14] dan Hamzah (2007) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan ^[15].

6) Belanja Modal Terhadap Kemiskinan

Hasil uji koefisien parameter antara belanja modal terhadap kemiskinan menunjukkan nilai t statistic sebesar 0,222. Nilai t-statistik tersebut lebih kecil dibanding nilai t-tabel (t-statistik < 1.98) maka hipotesis ditolak. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis keenam, belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Ini bermakna bahwa berbagai kebijakan/program pengentasan kemiskinan yang diimplementasikan di daerah semuanya masih merupakan program yang dirumuskan oleh pemerintah pusat. Selain formulasi kebijakan/program, juga dalam hal pembiayaan implementasi kebijakan/program pengentasan kemiskinan masih ketergantungan pada pemerintah pusat, sehingga sebagian besar pembiayaan pengentasan kemiskinan masih dibiayai oleh pemerintah pusat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Musliadi (2013) yang menjelaskan belanja modal negatif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh ^[16]. Hasil yang berbeda ditunjukkan Meilen *et al* (2014) yang menemukan bahwa variabel belanja langsung berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado ^[17].

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan dana alokasi umum masih belum signifikan oleh karenanya

- sebaiknya pemerintah memprioritaskan alokasi dana alokasi umum dan belanja modal pada bidang-bidang yang langsung bersentuhan dengan kepentingan publik, seperti infrastruktur atau fasilitas-fasilitas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi
- b. Dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena dana alokasi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kurang dioptimalkan untuk berbagai aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya sehingga tidak mampu meningkatkan produktivitas perekonomian dan pada akhirnya tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.
 - c. Belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini bermakna bahwa alokasi belanja modal tidak didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana untuk masyarakat akan tetapi digunakan untuk keperluan belanja rutin yang kurang produktif seperti belanja pegawai, perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan (Situngkir, 2009) sehingga tidak mampu meningkatkan produktivitas perekonomian dan pada akhirnya tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah^[9].
 - d. Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Hal ini disebabkan karena Dana Alokasi Khusus yang diterima pemerintah Kota Tegal digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus yang dimaksud adalah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh APBN misalnya untuk layanan berkaitan dengan penurunan tingkat kemiskinan di Kota Tegal. Berdasarkan hal tersebut pemerintah kota Tegal berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam pengentasan kemiskinan. Ada beberapa program yang diwujudkan seperti Raskin, Bantuan Siswa Miskin, Program Keluarga Harapan, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, Akan tetapi, meskipun telah banyak program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan, ternyata jumlah penduduk miskin tidak mengalami penurunan secara signifikan. Menurut kajian yang dilakukan Balitbang Provinsi Jawa Tengah, kendala utama yang dihadapi dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan dapat dikalsifikasikan dalam skala kebijakan, konsep, implementasi dan partisipasi.
 - e. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan adalah didasari pada kondisi *trickle down effect* yang menyebutkan adanya bagian yang menetes kebawah dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Kondisi ini menjelaskan bahwa kesejahteraan dengan sendirinya akan terwujud apabila terjadi pembangunan dalam skala besar sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas perekonomian, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan per kapita (berarti mengurangi kemiskinan), menaikkan permintaan dan penawaran, dan seterusnya berputar mengikuti mekanisme perekonomian.
 - f. Belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Ini bermakna bahwa berbagai kebijakan/program pengentasan kemiskinan yang diimplementasikan di daerah semuanya masih merupakan program yang dirumuskan oleh pemerintah pusat. Selain formulasi kebijakan/program, juga dalam hal pembiayaan implementasi kebijakan/program pengentasan kemiskinan masih ketergantungan pada pemerintah pusat, sehingga sebagian besar pembiayaan pengentasan kemiskinan masih dibiayai oleh pemerintah pusat.

5. Daftar Pustaka

- [1] Thesaurianto, K. (2007). *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah*. Tesis. Universitas Diponegoro Semarang.
- [2] Sulistyowati, D. (2011). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- [3] Maipita, I. (2014). *Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [4] Kuncoro, M. (2004). *Ekonomika Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [5] Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Unit Percetakan dan Percetakan STIM YKPN.
- [6] Yustikasari, D. d. (2007). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- [7] Endrawati, U. M. (2010). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat*. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 5 (2), 68-84.
- [8] HM, W. A. (2009). *Konsep dan Aplikasi PLS (Partial Least Square) Untuk Penelitian Empiris*. Yogyakarta: BPF E.
- [9] Situngkir, A. (2009). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemkot/ Pemkab Sumatera Utara*. Tesis Universitas Sumatera Utara.
- [10] Badrudin, R. (2012). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah*. Disertasi. Universitas Airlangga. Surabaya.
- [11] Bastias, D. D. (2010). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.
- [12] Wahyuniarti, H. S. (2007). *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*. Institut Pertanian Bogor.
- [13] Wijaya, A. (2011). *Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kabupaten/ Kota di DIY)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- [14] Nurdin, A. H. (2009). *Pengaruh Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam APBD Kota dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan Daerah Perkotaan Di Indonesia*.
- [15] Hamzah, A. S. (2007). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 4 (2):211-228.
- [16] Musliadi. (2013). *Analisis Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/ Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2008-2012*. Yogyakarta: Tesis Universitas Gajah Mada.
- [17] Meilen Gleri Paseki, A. N. (2014). *Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Manado Tahun 2004-2012*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 14 No 3 Oktober 2014.